The background image shows a busy urban street in West Java. On the left, a truck is parked with its back open, and several people are loading or unloading goods. A person in a red cap is pushing a hand truck loaded with bricks. In the center, a person on a motorcycle is riding away from the camera. The street is lined with various shops and buildings, including one with a sign for 'BUANA ROYALE RESIDENCE'. The sky is overcast.

TANTANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF DI JAWA BARAT

ATHIA YUMNA

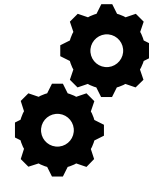
The SMERU Research Institute

Forum Pembangunan Daerah (FPD) Jawa Barat, 30 Juli 2019

Garis Besar Presentasi



Konteks Kewilayahan Pembangunan
Ekonomi di Jawa Barat



Karakteristik Kemiskinan Perkotaan
Jawa Barat



Studi Kasus: Kota Tasikmalaya



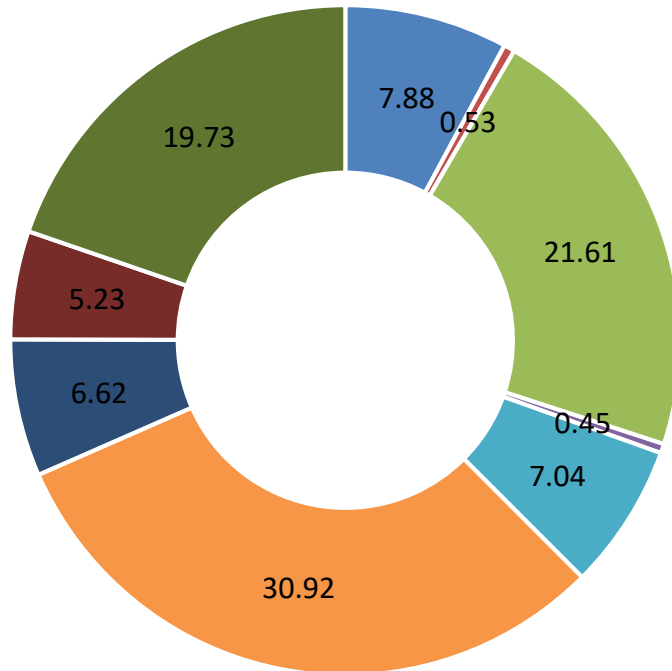
Tantangan bagi Penanggulangan
Kemiskinan Perkotaan



Implikasi Kebijakan

Perekonomian Jawa Barat

Kue Ekonomi Wilayah Perkotaan Jabar 2017



- Pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan
- Pertambangan
- Industri
- Listrik, gas, dan air minum
- Konstruksi
- Perdagangan, rumah makan, dan akomodasi
- Transportasi, pergudangan, dan komunikasi
- Lembaga keuangan dan real estate
- Jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan

Sektor Kerja 2017 (dalam persentase)

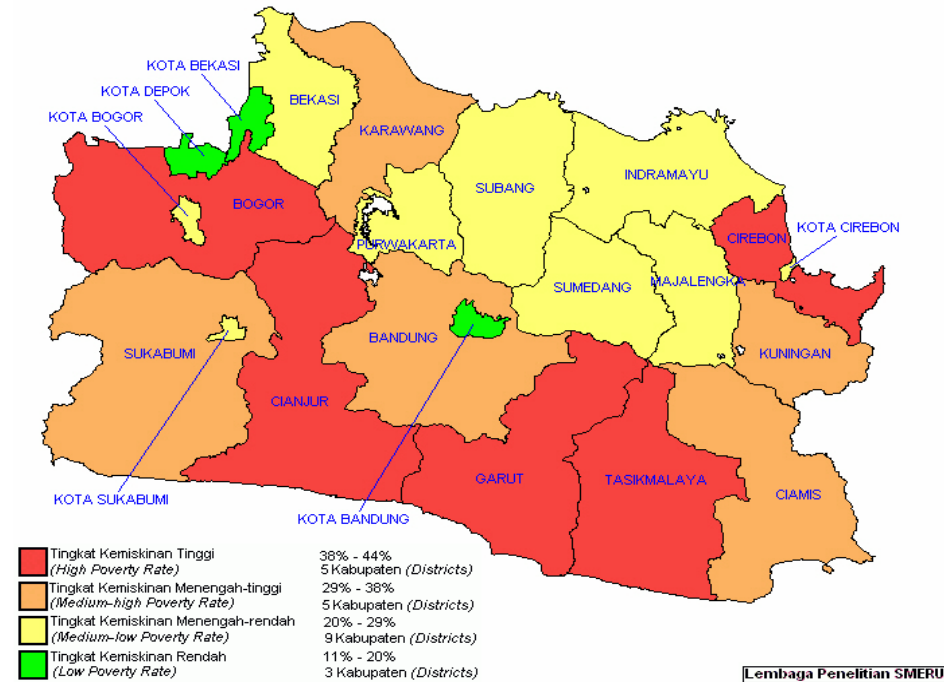


- Perdagangan, Rumah makan, dan akomodasi
- Industri pengolahan
- Jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan
- Pertanian, perkebunan, kehutanan

Kemiskinan Jawa Barat: Utara-Selatan

2000

Peta Kemiskinan Provinsi Jawa Barat - Tingkat Kabupaten
(Poverty Map of Jawa Barat Province - District Level)

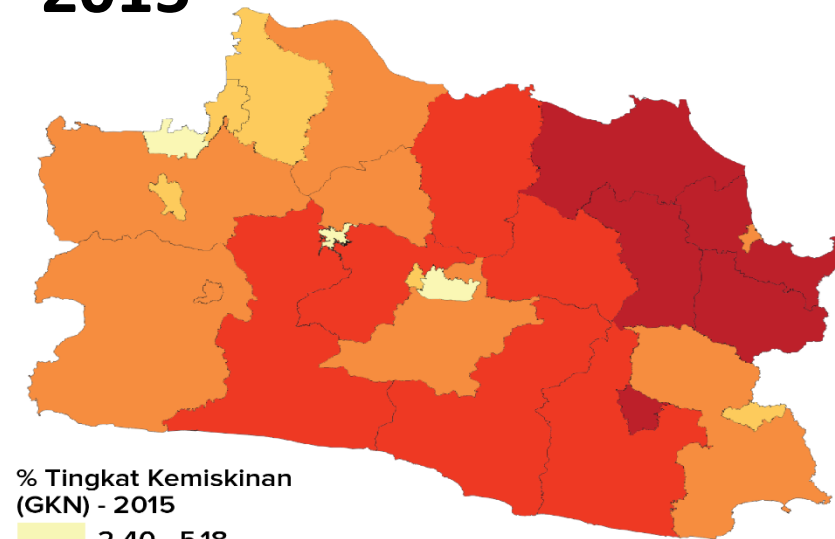


Tingkat kemiskinan di Jabar Selatan relatif lebih tinggi daripada Jabar Utara pada 2000.

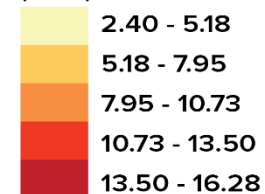
Sumber: PovMap SMERU 2010

Tingkat kemiskinan di sebagian kabupaten di Jabar Utara berubah menjadi lebih tinggi secara relatif daripada kab/kota lainnya pada 2015.

2015

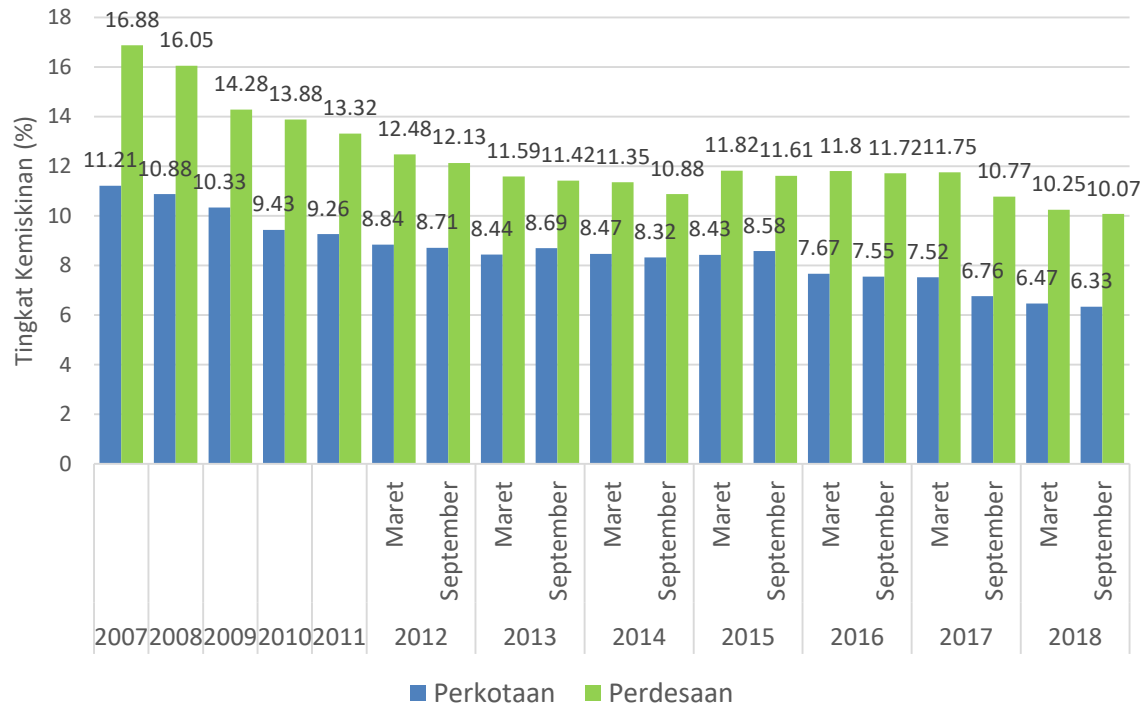


% Tingkat Kemiskinan (GKN) - 2015

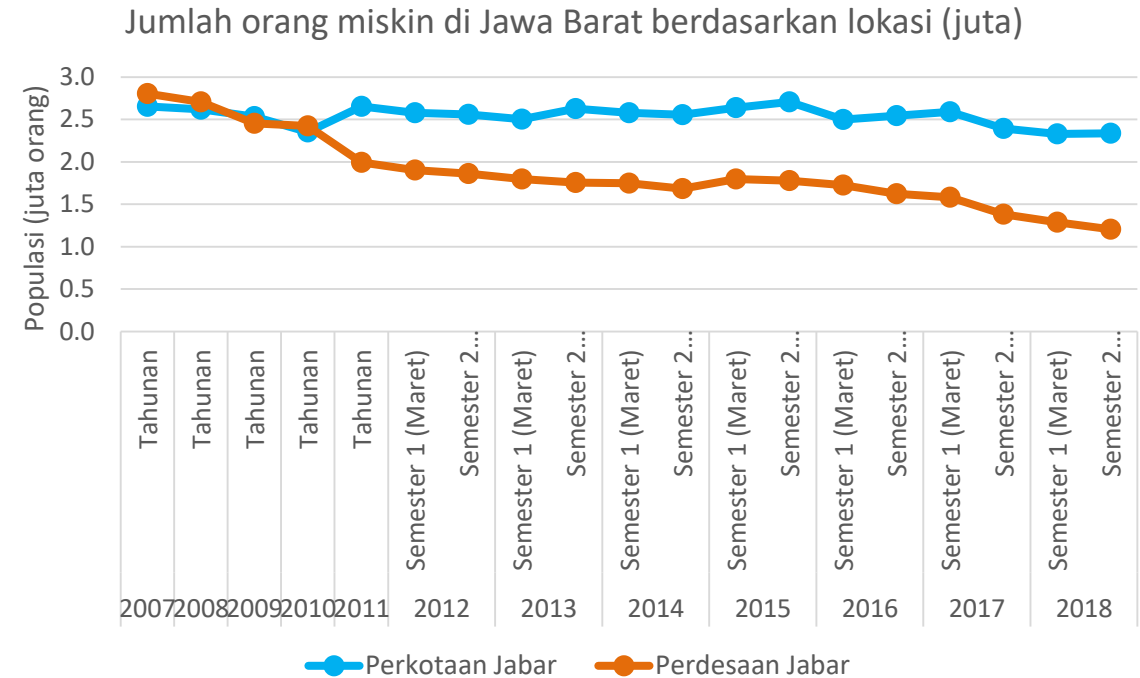


Sumber: PovMap SMERU 2015

Kemiskinan Jawa Barat: Perdesaan-Perkotaan



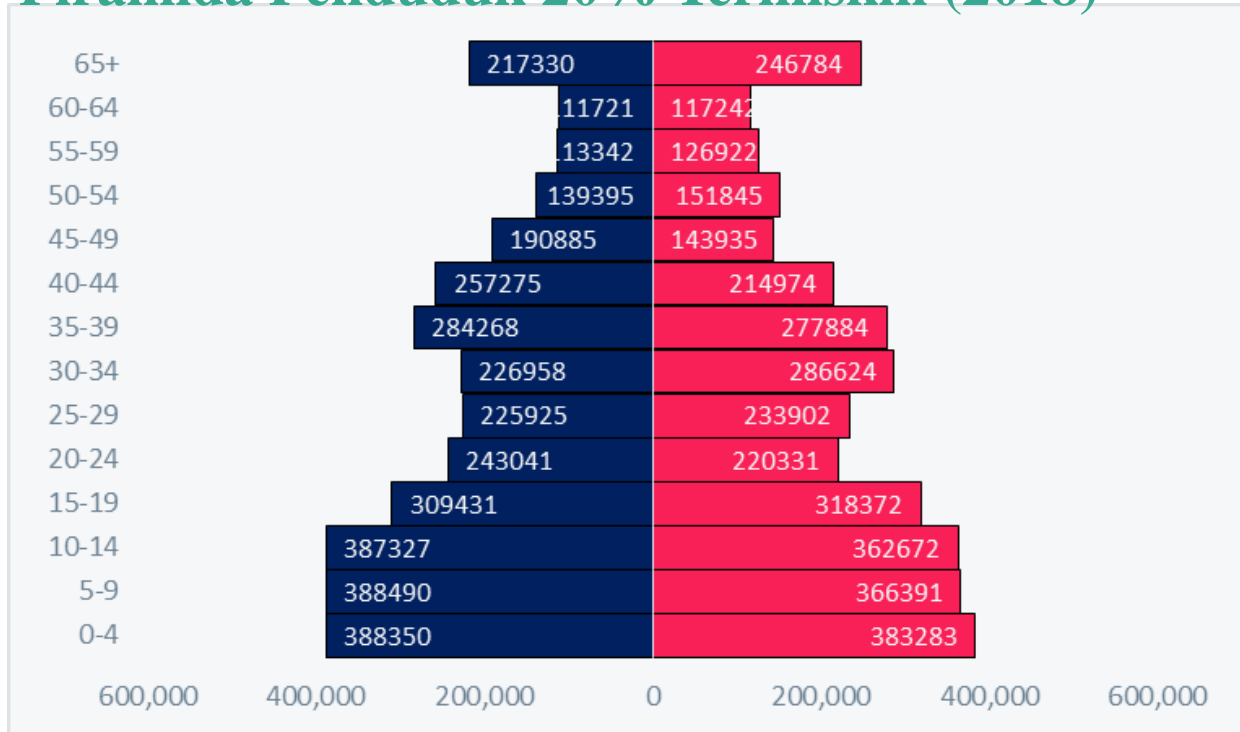
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018



Tingkat kemiskinan di perdesaan relatif lebih tinggi daripada di perkotaan. Akan tetapi, sejak 2011 hingga saat ini **jumlah orang miskin di daerah perkotaan lebih besar** daripada di perdesaan.

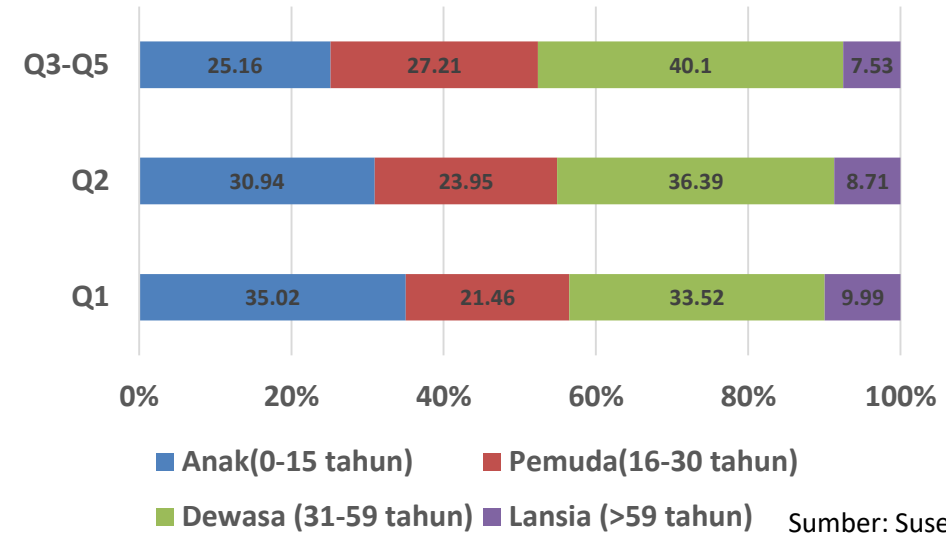
Karakteristik Penduduk Miskin Perkotaan Jawa Barat

Piramida Penduduk 20% Termiskin (2018)



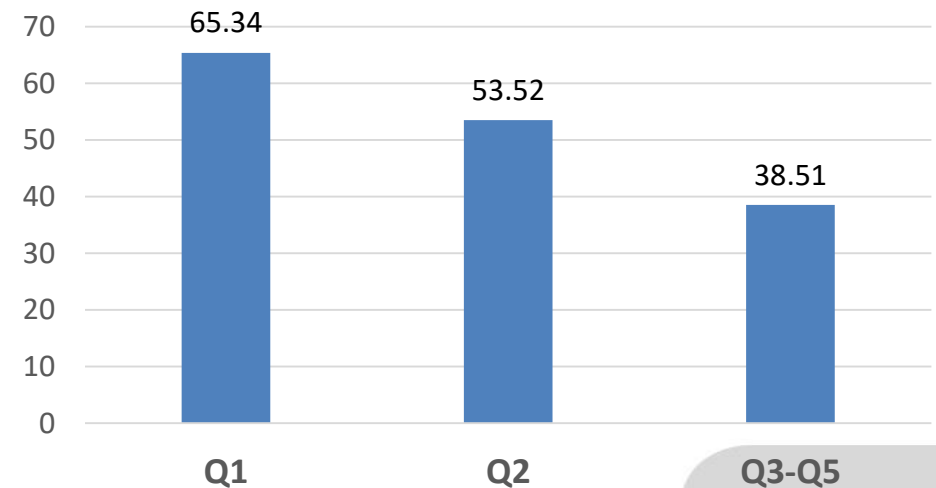
Sumber: Susenas 2018 (diolah)

Struktur Penduduk Perkotaan (2018)



Sumber: Susenas 2018 (diolah)

Rasio Ketergantungan Penduduk Perkotaan (2018)

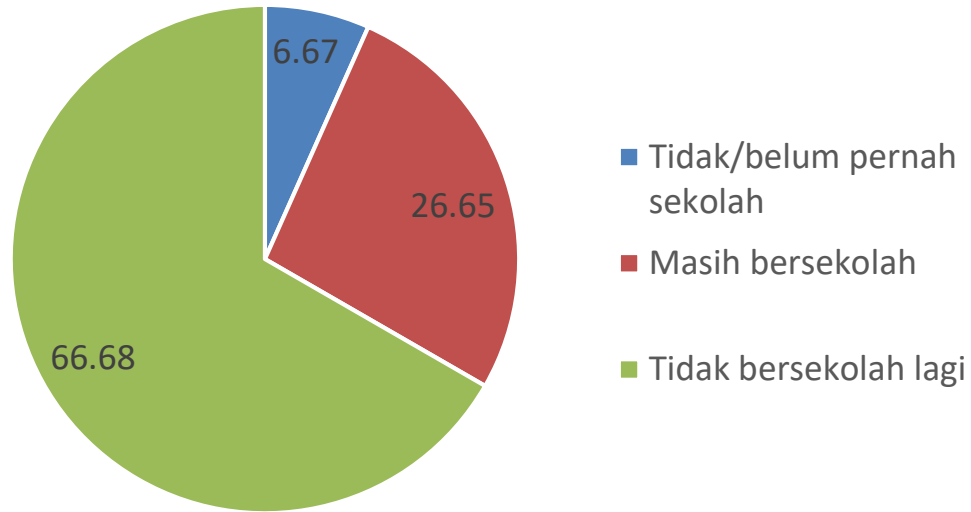


Sumber: Susenas 2018 (diolah)

Piramida penduduk 20% termiskin di wilayah perkotaan Jawa Barat pada 2018 didominasi oleh penduduk dewasa dan anak-anak. Namun, jumlah penduduk usia anak dan lansia, serta persentasenya terhadap total penduduk pada kelompok ini lebih besar daripada kelompok kesejahteraan lainnya.

Status Pendidikan Penduduk Perkotaan Jawa Barat

Status Bersekolah Penduduk Berusia >5 Tahun (2018)



Mengapa Tidak Bersekolah?

Penduduk Berusia 5-24 Tahun (2017)



18,66%

Karena masalah biaya



30,64%

Karena Bekerja

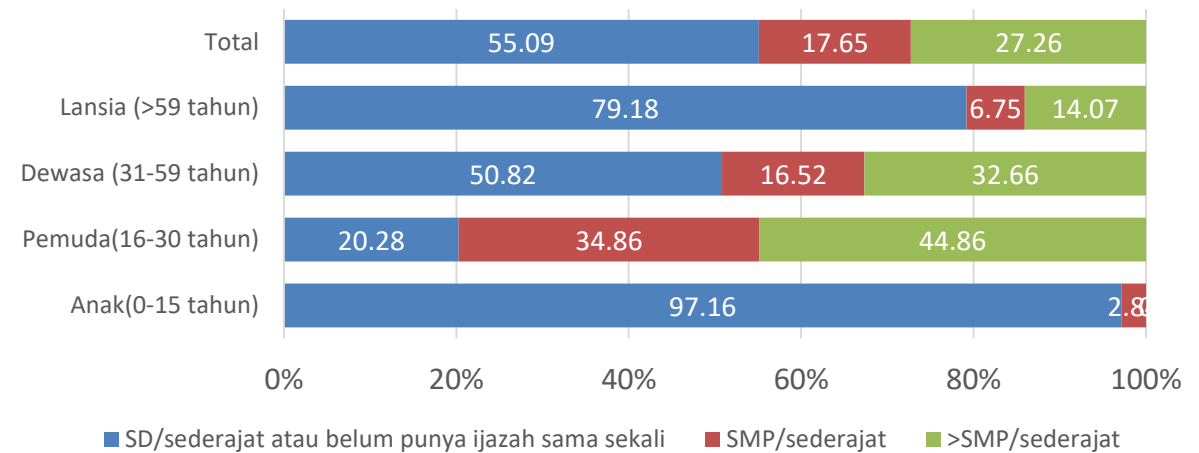


8,77%

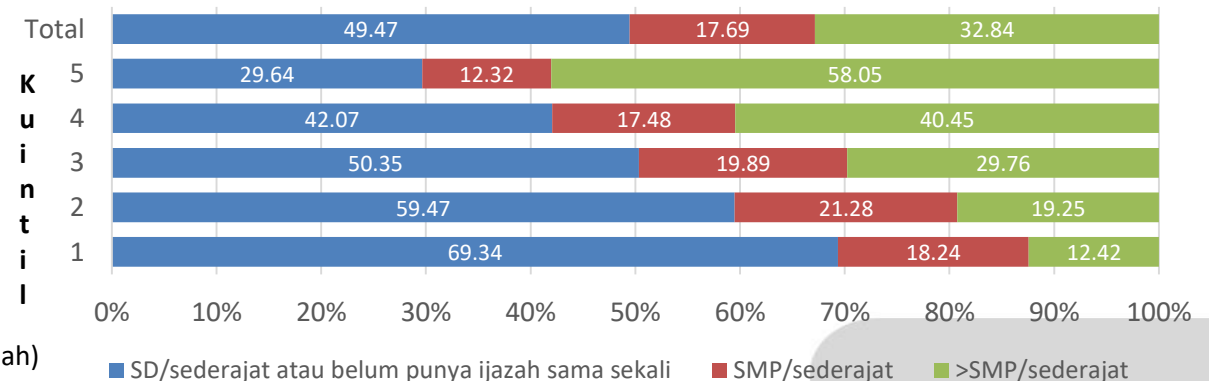
Karena Menikah

Sumber: Susenas 2018 (diolah)

Ijazah Terakhir Penduduk >15 tahun (2018)



Ijazah Terakhir Menurut Kelompok Pengeluaran 2018



Karakteristik Rumah Tangga Miskin Perkotaan

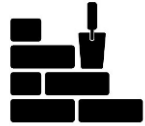
Profil RT 20% Termiskin (2018)



74,93%
Tinggal di
Bangunan
milik sendiri



76,27%
Atap rumah
dari geting



86,44%
Dinding
terluas tembok



71,23%
Lantai terluas
keramik



99,9%
Penerangan
utama PLN



85,67%
Masak
menggunakan
gas LPG



36,64%
Akses air
bersih



51,87%
Akses sanitasi
layak

Profil Kepala Keluarga RT Perkotaan (2018)

Kepala Keluarga Laki-laki (KKL)

40,6%
SD/Sederajat atau
belum punya
ijazah

92,75% Berstatus
menikah

81,3% RT 20%
Termiskin Memiliki
1-3 ART

Kepala Keluarga Perempuan (KKP)

61,44%
SD/Sederajat atau
belum punya
ijazah

68,57% Cerai mati

90,06% RT 20%
Termiskin memiliki 1-
3 ART



Kondisi Ketenagakerjaan di Perkotaan Jabar

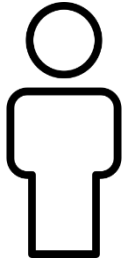
TPAK

TPT



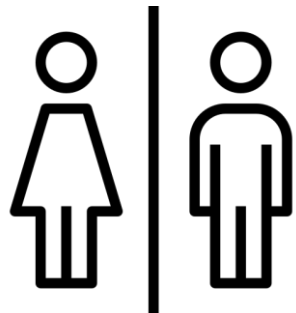
44,55%
Terendah ke-7 di
Indonesia

9,07%
Tertinggi ke-7 di
Indonesia



81,50%
Tertinggi ke-7 di
Indonesia

8,53%
Tertinggi ke-5 di
Indonesia

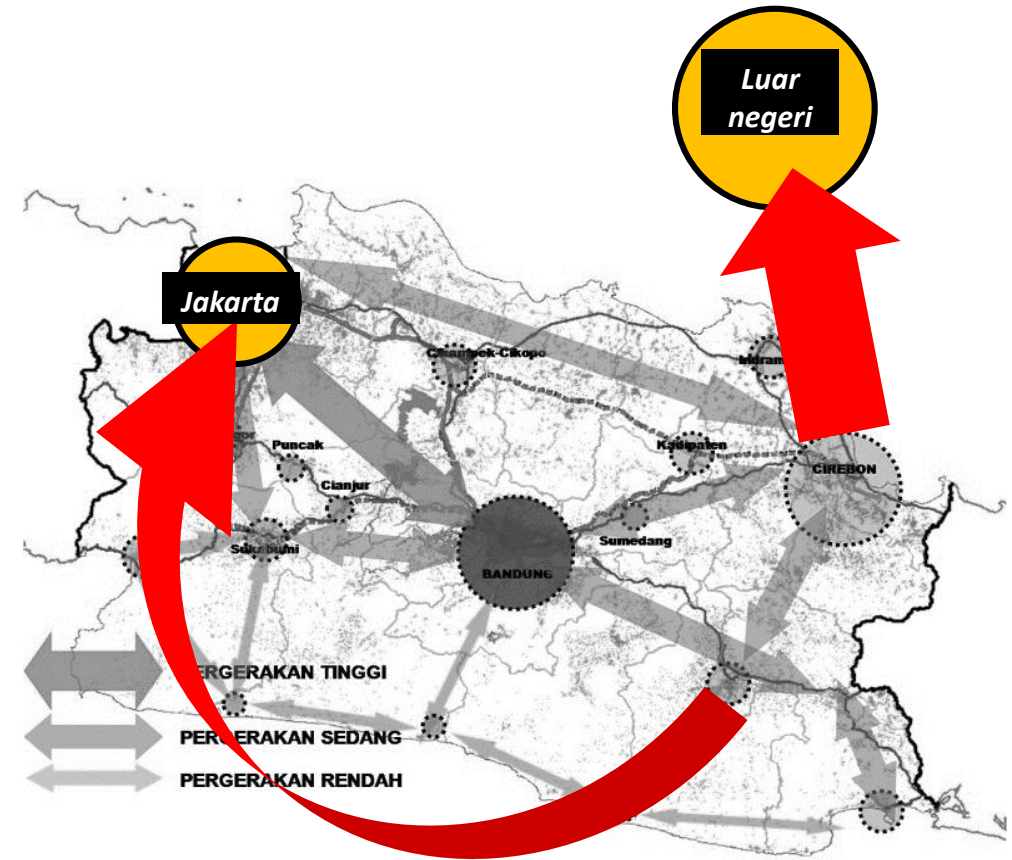


63,24%
Terendah ke-11 di
Indonesia

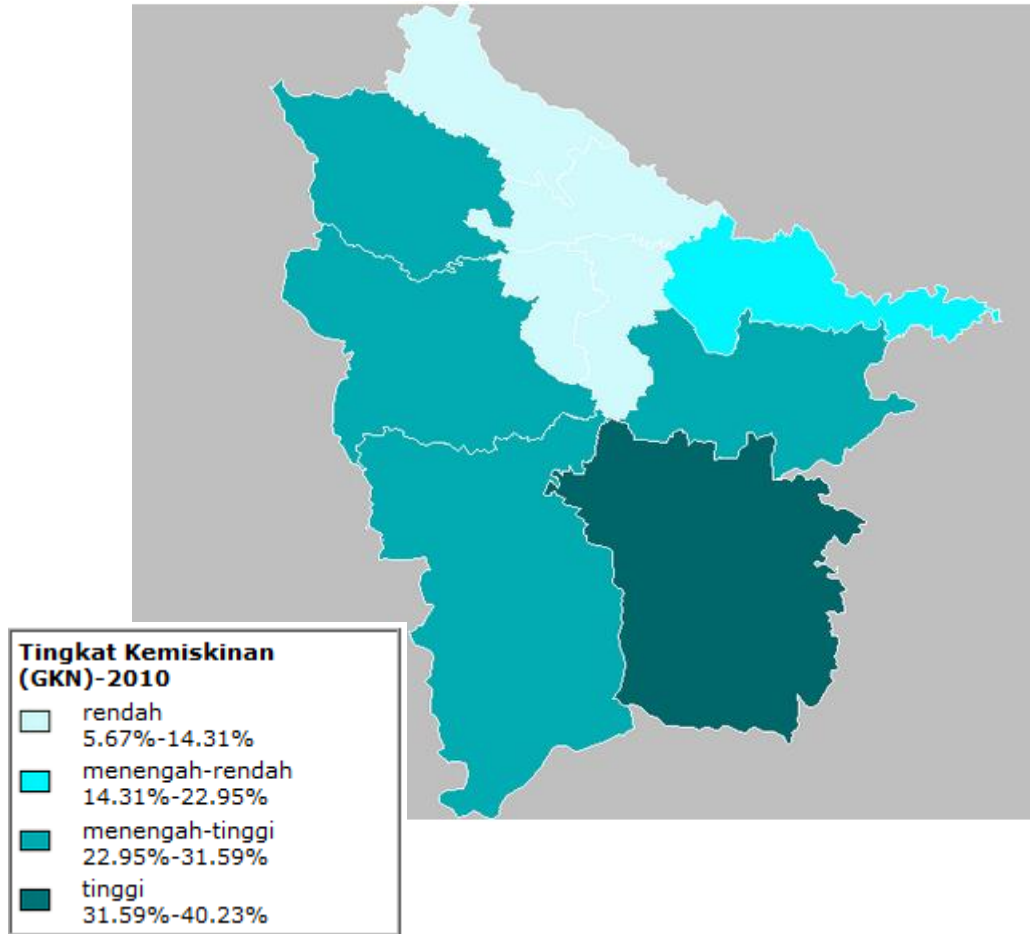
8,72%
Tertinggi ke-5 di
Indonesia

Permasalahan Kemiskinan Perkotaan

- ❑ Migrasi yang tidak berkualitas
 - ✓ *Pseudo-urbanization*
 - Pekerjaan tidak tetap/sektor informal
 - Permukiman kumuh
 - ✓ Migrasi melompat
- ❑ Pelayanan dasar vs laju pertumbuhan penduduk
- ❑ Peningkatan konektivitas nasional-global tidak diikuti peningkatan kemampuan memanfaatkan peluang (usaha)
- ❑ Kemajuan kota (modernisasi) vs gentrifikasi, misalnya:
 - Dampak Tol Cipali
 - Perkembangan Kota Tasikmalaya sebagai pusat perdagangan dan perumahan

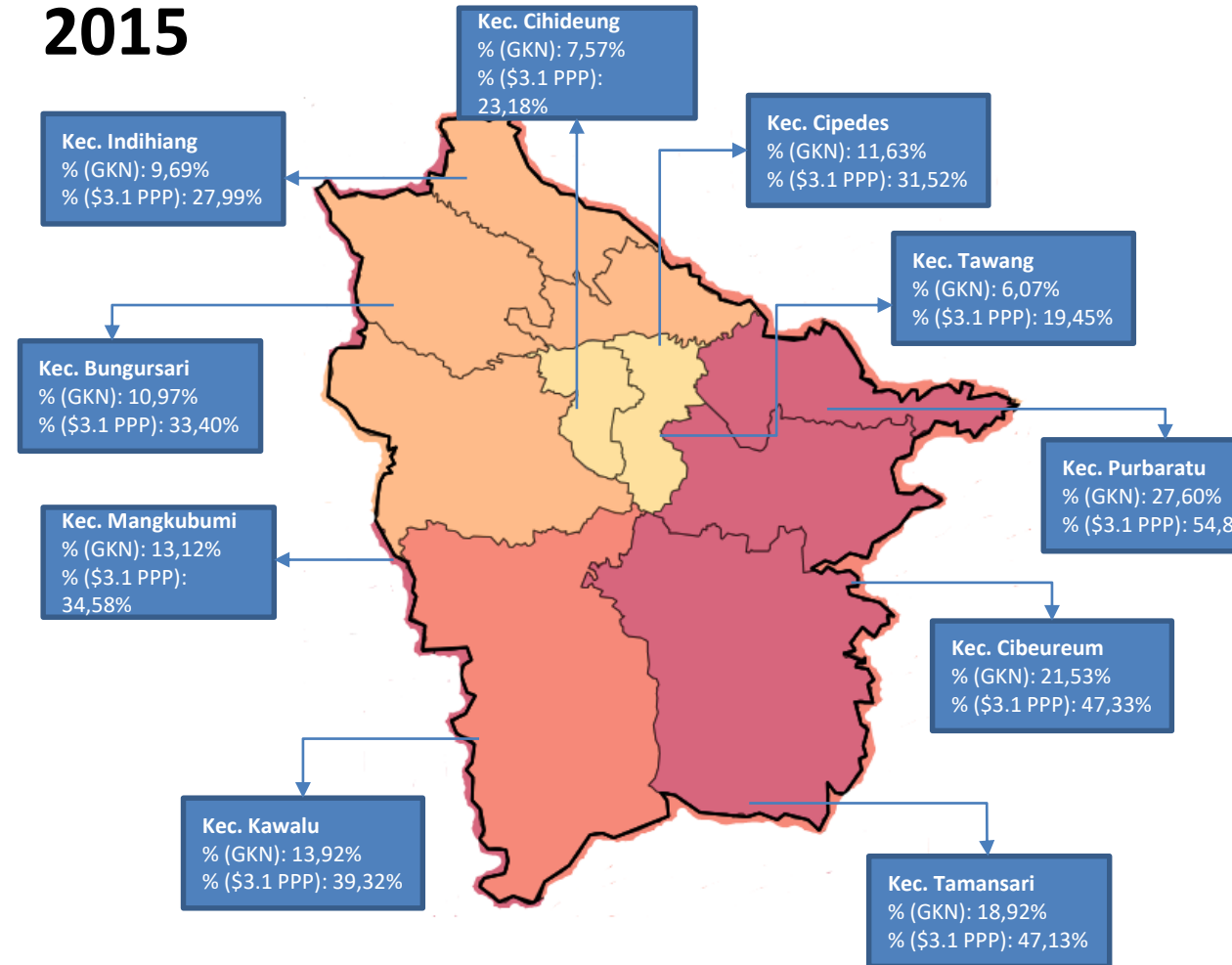


2010



Sumber: PovMap SMERU, 2010

2015



Sumber: PovMap SMERU, 2015

Tingkat kemiskinan Kota Tasikmalaya 2010 dan 2015

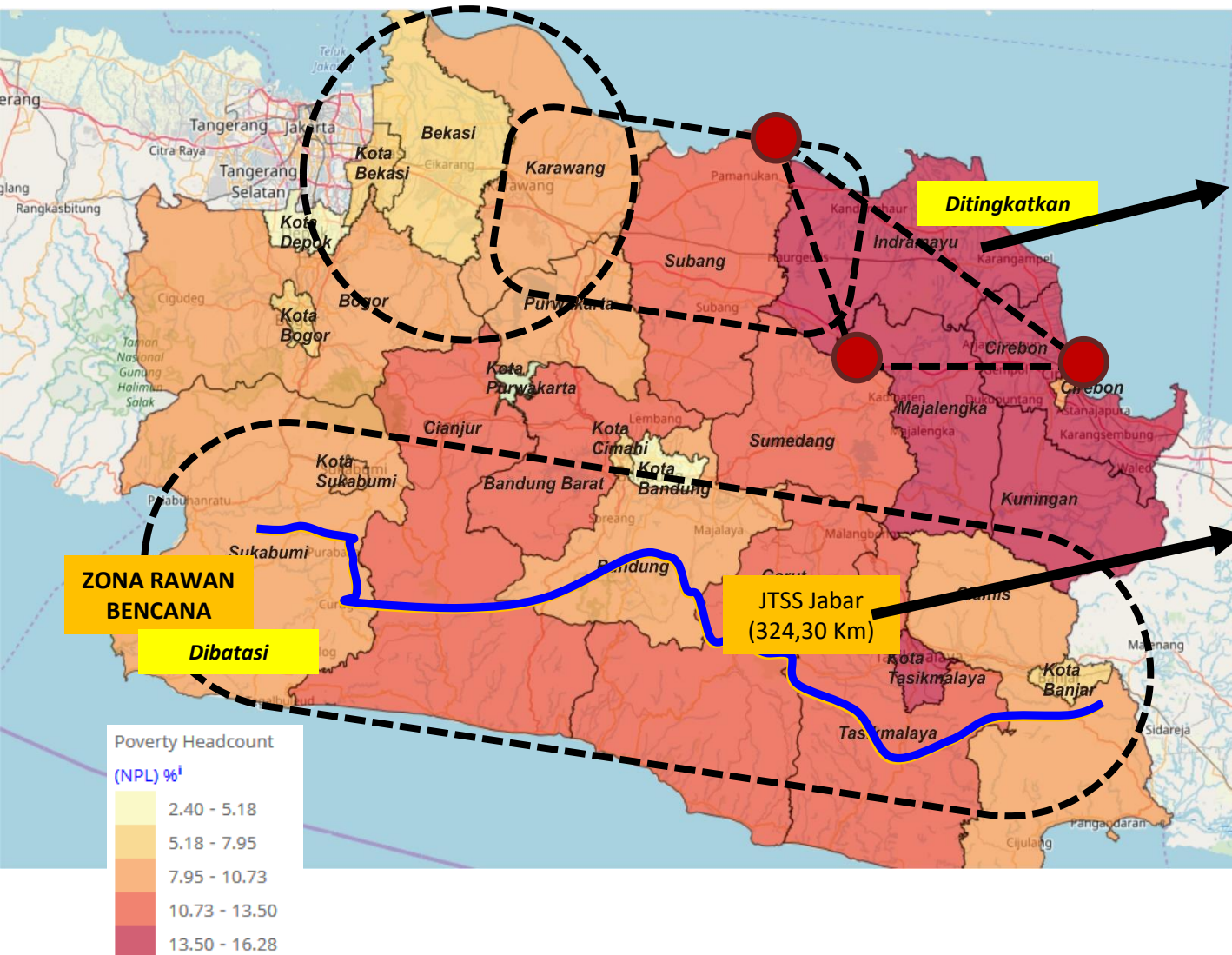
Studi Kasus: Kota Tasikmalaya

- ❑ Persentase kemiskinan Kota Tasikmalaya: 14,8% (2017)
- ❑ Kota Tasikmalaya dikenal sebagai kota perdagangan dan pusat UMKM
- ❑ Isu industri UMKM di Tasikmalaya:
 - Mekanisasi (mesin bordir manual vs komputer) → permintaan TK berkurang
 - Persaingan dengan produk Cina di pasar Tanah Abang
 - Pemasaran → Belum optimal memanfaatkan pasar *online*
 - Inovasi produk yang rendah
 - Upah buruh borongan/maklon yang sangat rendah
- ❑ Daerah perumahan yang tumbuh pesat

Karakteristik orang miskin (berdasarkan hasil FGD):

Aspek	Deskripsi
Aset ekonomi	Tempat tinggal: dinding rumah dari anyaman bambu, atap bocor, tidak punya toilet, dapur & ruang tamu jadi satu, fasilitas MCK bersama
Pekerjaan	Buruh harian lepas (buruh tani, anyam mendong), dagang asongan
Penghasilan	Maksimal 50 rb/hari (buruh tebang kayu), 7rb/hr (anyam mendong), 3.5-5rb/hr (buruh payet)
Tingkat Pendidikan	Kepala rumah tangga mayoritas SD/tidak sekolah, pendidikan anak hanya lulus SD
Jumlah ART	Kebanyakan RTM memiliki anak >3 orang
Sosial	Gaya hidup konsumtif, perilaku jajan anak

Tantangan ke Depan: Sejauh Mana Warga Miskin dapat Memanfaatkan Pembangunan di Jabar?



SEGITIGA REBANA

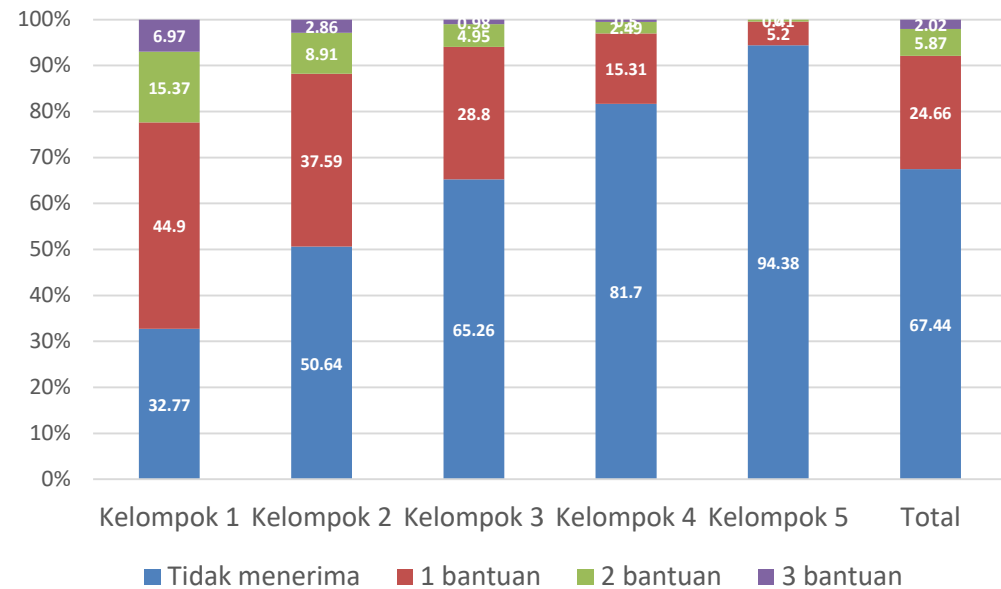
- Skenario: Green Industry – *Hi-tech*, padat karya-padat modal → Butuh SDM bukan low-skilled
- Alih fungsi lahan → berkurang kesempatan kerja di sektor pertanian

JALUR TENGAH SELATAN

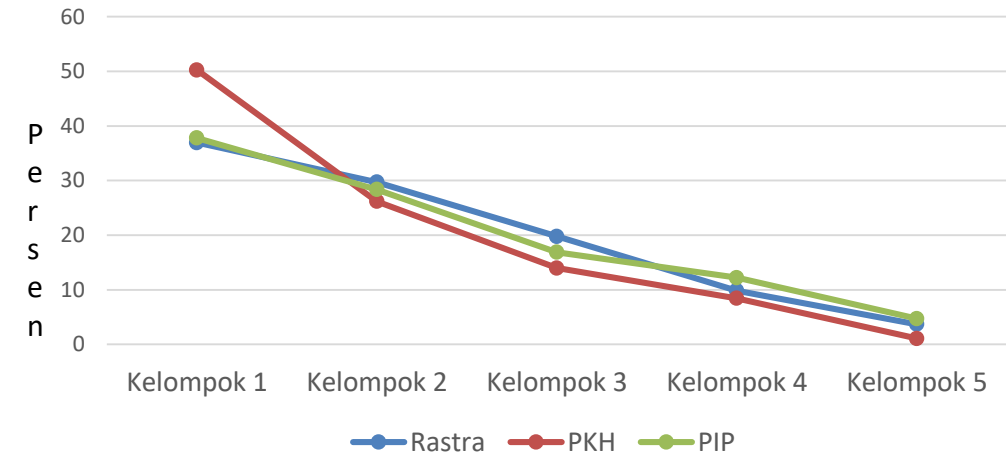
- Skenario pengembangan setelah jalan terbangun → Diserahkan pada pasar?
- Pusat-pusat transit?
- Penetapan kws. strategis pariwisata → bagaimana potensi ekonomi ikutan: akomodasi dan transportasi?

Tantangan: Efektifitas Program Bantuan Sosial

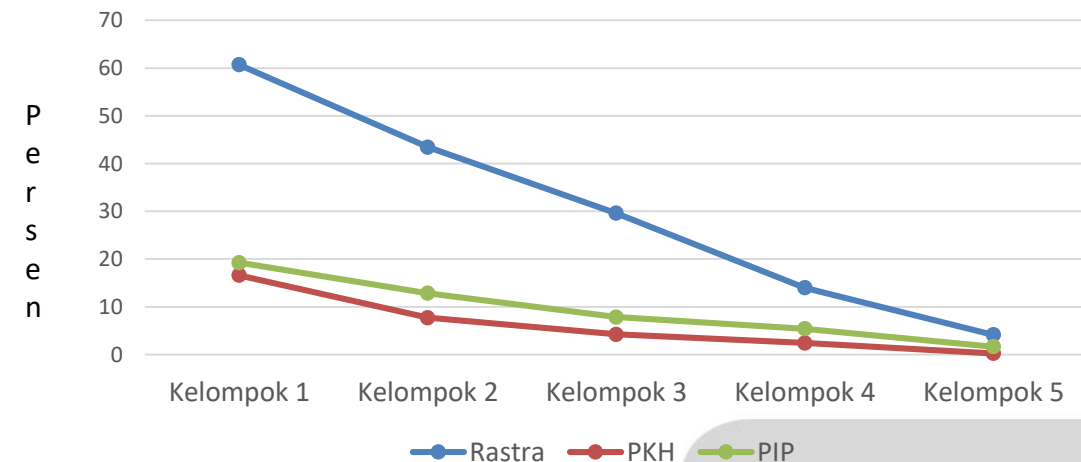
Integrasi Bansos Perkotaan Jabar 2018



Distribusi Bansos Perkotaan 2018



Cakupan Bansos Perkotaan 2018



Pada 2018, distribusi PKH di wilayah perkotaan Jabar terlihat lebih baik daripada rastra dan PIP (ditandai dengan tingginya jumlah penerima pada kelompok pengeluaran 20% terbawah dan rendahnya penerima pada kelompok pengeluaran 20% teratas). Sementara itu, cakupan penerima PKH relatif lebih kecil daripada program bantuan sosial yang lain.

- ❑ Seluruh pemangku kepentingan perlu menyepakati pola pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, khususnya dilihat dari perspektif kewilayahan di Jawa Barat
- ❑ Pembuat kebijakan dihadapkan pada “*trade-offs*” antara investasi jangka panjang (untuk pengeluaran sosial dan pengembangan penghidupan) dan pengambilan kebijakan yang bersifat *myopic* dan jangka pendek → diperlukan komitmen kuat untuk mencapai penurunan kemiskinan yang berkelanjutan
- ❑ Jabar harus memiliki *grand design* penanggulangan kemiskinan. Dari perspektif kewilayahan, dimungkinkan 2 alternatif:

Opsi 1: Mendorong migrasi yang berkualitas ke wilayah perkotaan yang sudah ada (dengan menyiapkan orang miskin untuk bisa menangkap peluang penghidupan di perkotaan)

Opsi 2: Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru baik di Jabar Utara maupun Selatan, dan pada saat yang sama memastikan masyarakat miskin juga menikmati kue pertumbuhan tsb.

- ❑ Mempersiapkan SDM Jawa Barat (termasuk kurikulum SMK yang disusun lebih adaptif dengan arah pembangunan kawasan di Jawa Barat)
- ❑ Mendorong kebijakan afirmatif untuk menyediakan penghidupan dan fasilitas bagi para migran (subsidi rumah dan layanan dasar, transportasi publik, dll.) → agar mencegah gentrifikasi
- ❑ Membuka ruang kerja sama antarkab/kota untuk mengatasi masalah-masalah urbanisasi
- ❑ Meningkatkan kelembagaan dan tata kelola penanggulangan kemiskinan di kab/kota.

Terima Kasih

Pertanyaan dan saran: smeru@smeru.or.id

Website SMERU: <https://smeru.or.id>